

## ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KOTA KOTAMOBAGU

*BILLING SYSTEM ANALYSIS AND MARKET DEPOSITING LEVY ON INDUSTRY DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTMENT COOPERATION KOTAMOBAGU*

Oleh:

<sup>1</sup>Christa Najoan  
<sup>2</sup>Harijanto Sabijono  
<sup>3</sup>Christian Datu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [najoanchrista@gmail.com](mailto:najoanchrista@gmail.com)  
[h\\_sabijono@yahoo.com](mailto:h_sabijono@yahoo.com)  
[itho.cd@gmail.com](mailto:itho.cd@gmail.com)

**Abstrak:** Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan sistem penerimaan retribusi pasar harus ada pengendalian intern yang memadai agar pelaksanaan penagihan dan penyetoran dapat terkontrol dengan baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu. Penelitian ini dilakukan di DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar telah memadai, karena yang ada pada hasil penelitian juga terdapat pada teori pengendalian internal. Pimpinan Dinas sebaiknya dalam prosedur untuk pemungutan dan penyetoran tetap mempertahankan prosedur sesuai dengan sistem pengendalian internal yang terdapat di dalamnya dan untuk prosedur yang masih belum memadai untuk diperbaiki sesuai dengan sistem pengendalian internal pada pemerintahan.

**Kata kunci:** sistem pemungutan, penyetoran, retribusi pasar

**Abstract:** Revenue is earned income areas levied by local regulations in accordance with the legislation. In conducting the levy system market acceptance there must be an adequate internal control for the implementation of billing and remittance can be well controlled. The aim of research to analyze the collection system and deposit market tax at the Department of Industry, Trade Cooperation and Investment Kotamobagu City. This research was conducted in Disperindagkop & PM Kotamobagu City. The method used is descriptive qualitative method. The results showed the levy collection system and deposit market has been inadequate, because there on the research results is also available on the theory of internal control. Department leaders should be in the procedure for the collection and remittance of retaining the procedure in accordance with the internal control system contained therein and for procedures that are not sufficient to be fixed in accordance with the system of internal control in government.

**Keywords :** voting systems, deposit, levies market

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintahan khususnya di daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah (Halim dan Kusufi, 2013:105). Otonomi memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat (Halim dan Kusufi, 2013:141).

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.  
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Perimbangan.  
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah dana yang dapat bersumber dari:

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN) atau dari masyarakat.
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD diharapkan menjadi sumber pemasukan utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerah. Karena semakin besar kebutuhan daerah dibiayai oleh PAD maka akan makin tinggi kualitas otonominya. Sebaliknya semakin besar tingkat ketergantungan subsidi pemerintah terhadap APBD maka semakin rendah kualitas otonominya, yang akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah. (Permana, 2013).

Permana, (2013) cara meningkatkan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Juga dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya lain adalah terus menggali sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas dari masing-masing pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam memungut retribusi (Permana, 2013).

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penerimaan retribusi pasar pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum dalam (Pramono, Restianto dan Bawono, 2010 : 115).

### Sistem Penerimaan Kas

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Akuntansi penerimaan kas juga adalah proses aliran kas yang terjadi diperusahaan terus menerus sepanjang perusahaan masi terus beroperasi (Nordiawan dan Hertianti, 2010 : 161).

### Penerimaan Kas Daerah

Penerimaan kas daerah adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Penerimaan kas daerah (Pendapatan Daerah) dikelompokkan menjadi tiga kelompok antara lain.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

### Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 14. Bendahara penerimaan harus menyelenggarakan penetausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

### Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

### Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat (Permana, 2013).

### Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah menurut Mahmudi (2011:18) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan menggunakan/nikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

## Penelitian Terdahulu

Permana (2013) dengan judul Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Semarang, tujuannya untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2002-2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PDRB perkapita memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap retribusi pasar. Laju inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan penerimaan retribusi pasar. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis retribusi pasar. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian dan objek penelitian.

Erdaini (2015) dengan judul Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember, tujuannya untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi harian pasar dan mekanisme penyetoran retribusi harian pasar umum pada unit Pasar Tegal Besar yang dilakukan oleh bendahara pembantu Pembina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu, pemungutan dan penyetoran retribusi harian pasar telah berjalan dengan baik. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis retribusi pasar. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian dan objek penelitian.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Sugiyono (2014:13), mendefinisikan Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif kualitatif.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu dengan alamat Kompleks Perkantoran Jln. Kampus Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kode Pos 95711. Waktu penelitian pada bulan Januari 2016.

### Prosedur Penelitian

Dalam melakukan penelitian, prosedur-prosedur yang dilakukan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan penerimaan kas.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan mengenai penerimaan kas pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
4. Melakukan evaluasi data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui laporan penerimaan kas pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
5. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.

### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan datang langsung ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu kemudian melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut :

- a. Wawancara, dengan bertanya secara langsung pada bendahara penerimaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
- b. Studi dokumentasi, dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

## Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dengan membandingkan antara konsep-konsep teori dan pengendalian intern sehingga dapat dilihat apakah telah memadai atau tidak kemudian menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

#### A. Analisis Lingkungan Pengendalian Untuk Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

##### 1. Penegakan Integritas Dan Nilai Etika

Dalam sistem pemungutan retribusi pasar harian Surat Ijin Menempati (SIM) yang telah dibuat oleh para pedagang disimpan sebagai bukti oleh Sekretaris dan pedagang yang telah mendapat ijin tersebut sudah dapat menempati tempat di wilayah/lingkungan pasar. Kemudian karcis yang telah diminta ke DPPKAD akan deregister atau dihitung kembali oleh bendahara penerimaan untuk diberikan kepada para Mandor. Mandor pasar sebanyak 10 orang tersebut melakukan penagihan kepada para pedagang yang berada di pasar 23 Maret dan Pasar Serasi Kota Kotamobagu. Dalam system pemungutan ini telah tergambar adanya penegakan integritas dimana pihak yang terkait telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa sistem tersebut memadai karena adanya unsur-unsur yang mendukung dalam penegakan integritas yaitu peraturan sesuai dengan fungsi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar harian.

##### 2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Dalam hasil penelitian yang diperoleh untuk sistem pemungutan retribusi pasar dimana prosedur pemungutan sesuai dengan pengendalian intern pemerintah yang berkaitan dengan :

###### a. Fungsi

Semua pihak yang berkaitan dengan sistem pemungutan telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dimana sebelum karcis tersebut dibagikan kepada para mandor deregister terlebih dahulu oleh bendahara penerimaan setelah itu diberikan kepada para mandor sesuai dengan kebutuhan.

###### b. Pelatihan dan Pembimbingan

Dalam hasil penelitian mandor yang nantinya akan diberikan tugas untuk melakukan pemungutan akan diberikan arahan dan bimbingan tatacara pemungutan yang baik oleh para pegawai yang bertugas dalam peatihan dan bimbingan. Biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun.

###### c. Pimpinan Instansi Pemerintah

Pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu yang menduduki jawabatan sebagai bendahara penerimaan biasanya dipilih oleh Kepala Dinas dilihat dari kompetensi dan kinerja pegawai tersebut, dan yang menjadi mandor adalah mereka yang diajukan oleh para pegawai yang membawahi bidang pasar dan telah melihat kemampuan dari orang tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi pasar harian tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dibandingkan dengan teori pengendalian intern pada pemerintah dapat dikatakan bahwa sistem tersebut sudah memadai karena terdapat beberapa unsur yang ada dalam teori pengendalian intern yang sesuai dengan hasil penelitian.

##### 3. Kepemimpinan yang Kondusif

Dalam penelitian berkaitan dengan pengendalian intern pemerintah pendelegasian wewenang yang tepat, Kepala Dinas selaku pemimpin mempertimbangkan dengan baik pemberian jabatan untuk bendahara penerimaan, begitu juga dengan pemberian wewenang untuk para mandor akan dilihat dari kemampuan dan integritas orang tersebut. Dari hasil penelitian yang diperoleh bila dikaitkan dengan teori pengendalian intern pada pemerintah dapat dikatakan belum memadai karena dari 5 unsur yang ada dalam teori dalam hasil penelitian hanya ada satu yang terpenuhi.

##### 4. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Dalam hasil penelitian yang diperoleh untuk sistem pemungutan retribusi pasar dimana prosedur penerbitannya telah sesuai dengan teori pengendalian intern pemerintah yang berkaitan dengan :

- a. **Ukuran dan Sifat Kegiatan Instansi**  
Dalam sistem pemungutan retribusi pasar harian, bendahara memberikan karcis sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan luas wilayah yang akan ditagih oleh masing-masing mandor.
- b. **Kejelasan Tentang Wewenang Dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintah**  
Dalam hasil penelitian bahwa dalam proses pemungutan retribusi pasar pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Sekretaris yang bertugas melihat dan menyimpan bukti SIM dari para pegawai, Bendahara penerimaan yang bertugas untuk memverifikasi atau menghitung jumlah karcis yang akan diberikan kepada mandor, dan mandor yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi pasar harian dari pedagang.
- c. **Menjelaskan Kejelasan Hubungan Dan Jenjang Pelaporan Intern Dalam Instansi Pemerintah.**  
Dalam sistem pemungutan hanya pedagang yang telah membuat SIM yang bisa menempati kios dan memberikan retribusi tetapi pada kenyataannya ada banyak pedagang yang membuka lapak liar dan tidak mempunyai ijin atau pedagang yang mempunyai dagangan dalam jumlah kecil dan tidak menetap sehingga dengan kebijakan yang diambil DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu mendata para pedagang tersebut dan mereka pun harus membayar retribusi pasar harian tersebut.  
Dari hasil penelitian yang diperoleh dibandingkan dengan teori pengendalian intern pada pemerintah dapat dikatakan bahwa sistem tersebut sudah memadai karena terdapat beberapa unsure yang ada dalam teori pengendalian intern yang sesuai dengan hasil penelitian.

#### **5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat**

Kepala Dinas selaku pemimpin mempertimbangkan dengan baik pemberian jabatan untuk bendahara penerimaan, begitu juga dengan pemberian wewenang untuk para mandor akan dilihat dari kemampuan dan integritas orang tersebut. Dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi pasar harian telah memadai karena unsur-unsur yang ada dalam teori juga terdapat dalam hasil penelitian.

#### **6. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal**

Dalam hasil penelitian untuk pengawasan pemungutan yang dilakukan oleh mandor diawasi oleh pegawai yang membawahi bagian pasar dan jika menemui temuan atau keluhan dari para pedagang tentang cara pemungutan atau apapun yang tidak sesuai dengan peraturan akan dikenai sanksi bahkan diganti. Dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori dapat dikatakan bahwa sistem untuk pemungutan retribusi telah memadai karena unsure-unsur yang ada dalam teori terdapat dalam hasil penelitian.

#### **7. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait**

Dari hasil penelitian tidak terdapat hambatan dalam permintaann karcis ke DPPKAD. DPPKAD dalam pemberian karcis selalu sesuai dengan jumlah yang diminta dan prosesnya cepat.

#### **B. Penilaian Resiko**

Dalam proses pemungutan retribusi pasar harian yang dilakukan oleh mandor DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu telah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi misalnya ada mandor yang dalam proses pemungutan tidak melakukan sesuai dengan peraturan maka DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu menunjuk pegawai untuk mengawasi proses pemungutan retribusi tersebut. Sistem pemungutan retribusi pasar harian ini dapat dikatakan memadai karena yang ada dalam teori pengendalian intern pada pemerintahan juga terdapat pada hasil penelitian yang diperoleh.

#### **C. Kegiatan Pengendalain**

Dalam hasil penelitian yang diperoleh dari sistem pemungutan retribusi pasar telah sesuai dengan teori pengendalian intern pemerintah yang berkaitan dengan :

- a. **Riview atas kinerja instansi pemerintah**  
Pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu untuk proses penagihan retribusi pasar yang dilakukan setiap hari. Melalui laporan para pengawas Kepala Dinas selaku pemimpin dapat melihat kinerja yang dilakukan oleh para mandor apakah sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. **Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu setiap pagi melakukan apel pagi dan doa bersama sebelum melakukan kegiatan. Dan setiap sebulan sekali para pegawai diminta untuk mengikuti pengajian bersama bagi yang beragama muslim. Tetapi yang beragama Kristen belum adanya jadwal untuk beribadahbersama.

c. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Dari hasil analisis untuk pembuatan surat ijin bagi para pedagang yang akan berdagang di area pasar yang kebanyakan pedagang tidak mau membuat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga kesadaran dari para pedagang itu sendiri tentang peraturan yang ada.

d. Pengendalian Fisik Atas Asset

Dari hasil penelitian untuk setiap akun memiliki kodenya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada. Kode akun tersebut berfungsi agar dapat membedakan akun-akun yang ada pada rekening. Untuk yang berkaitan dengan aset tetap misalnya kendaraan dinas pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu ada untuk Kepala Dinas dan ada kendaraan operasional yang bisa digunakan karyawan.

e. Pemisahan Fungsi

Untuk sistem pemungutan retribusi pasar ada 3 pihak selain yang terkait dan mempunyai tugas masing-masing yaitu bendahara penerimaan yang bertugas untuk menghitung dan memberikan nomor untuk setiap karcis, mandor yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi pasar dan pedagang yang membayar retribusi.

f. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting

Dalam penelitian pemberian karcis kepada para mandor diperiksa, dihitung dan diberikan nomor oleh bendahara penerimaan agar supaya tidak terjadi kelebihan jumlah karcis dan memudahkan bendahara penerimaan memeriksa kembali jika mandor akan menyetorkan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dibandingkan dengan teori pengendalian intern dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi telah memadai karena beberapa unsur yang ada pada hasil penelitian juga terdapat pada teori pengendalian internal.

#### D. Informasi dan Komunikasi

Penelitian sistem pemungutan mulai dari penomoran karcis sampai dengan proses pemungutan telah sesuai sehingga para mandor dan pedangan dapat bekerja sama dalam proses pemungutan retribusi. Bila dibandingkan dengan teori pengendalian intern sistem ini dikatakan telah memadai.

#### E. Pemantauan

Penelitian untuk proses pemungutan tidak ada kendala karena dalam proses pemungutan para mandor telah melakukan sesuai dengan peraturan dan diawasi oleh pengawas lapangan. Dari hasil penelitian dikaitkan dengan teori pengendalian intern sistem pemungutan retribusi pasar harian sudah sesuai dengan teori yang telah diterapkan dalam prakteknya.

#### Sistem Penyetoran Retribusi Pasar Harian

##### A. Analisis Lingkungan Pengendalian Untuk Sistem Penyetoran Retribusi Pasar Harian

###### 1. Penegakan Integritas Dan Nilai Etika

Dalam sistem penyetoran, mandor menyetorkan hasil pemungutan retribusi serta jumlah kelebihan karcis kalau ada ke bendahara penerimaan kemudian bendahara penerimaan membukukan dan merekapitulasi dalam Surat Tansa Setor (STS). Bendahara penerimaan menyetor uang hasil pemungutan retribusi pasar ke Bank SULUT sebagai BUD yang ditunjuk dengan melampirkan STS, kemudian Bank akan memberikan bukti setor berupa slip pembayaran kepada bendahara penerimaan. Bank juga akan mengirimkan STS dan bukti setor sebagian keuangan DPPKAD, serta mengirim STS ke bagian pembukuan dan penomoran STS di DISPERINDAGKO & PM Kota Kotamobagu.

Dalam proses penyetoran telah tergambar adanya penegakkan integritas dimana setiap pihal yang terkait menjalankan fungsinya sesuai dengan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat dikatakan sistem tersebut memadai karena adanya unsure-unsur yang mendukung dalam penegakan integritas yaitu peraturan sesuai dengan fungsidari pihak-pihak yang berkaitan dengan penyetoran retribusi pasar.

###### 2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Dalam hasil penelitian yang diperoleh untuk proses penyeteroran hasil retribusi pasar harian telah sesuai dengan teori pengendalian intern pemerintah yang berkaitan dengan :

- a. Fungsi  
Semua pihak yang berkaitan dengan sistem penerimaan telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang ada, dimana setelah mandor melakukan pemungutan retribusi mandor menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerimaan untuk direkap dan dibukukan yang kemudian di setor ke Bank.
- b. Pelatihan dan pembimbingan  
Dalam hasil penelitian untuk pelatihan dan bimbingan pegawai dalam membantu mewujudkan visi dan misi, DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu melaksanakan bimbingan teknologi 2 kali dalam setahun.
- c. Pimpinan Instansi Pemerintah  
Pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu Kepala Dinas selaku pemimpin mengajukan nama pegawai yang dianggap berkompeten dan bertanggung jawab sebagai bendahara penerimaan dan diberikan SK oleh Walikota.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dibandingkan dengan teori pengendalian intern pada pemerintah dapat dikatakan bahwa sistem tersebut sudah memadai karena terdapat beberapa unsur yang ada dalam teori pengendalian intern yang sesuai dengan hasil penelitian

### **3. Kepemimpinan yang Kondusif**

Dalam penelitian berkaitan dengan pengendalian intern pemerintah pendelegasian wewenang yang tepat, Kepala Dinas selaku pemimpin mempertimbangkan dengan baik pemberian jabatan untuk bendahara penerimaan, begitu juga dengan pemberian wewenang untuk para mandor akan dilihat dari kemampuan dan integritas orang tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bila dikaitkan dengan teori pengendalian intern pada pemerintah dapat dikatakan belum memadai karena dari 5 unsur yang ada dalam teori dalam hasil penelitian hanya ada satu yang terpenuhi.

### **4. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan**

Dalam hasil penelitian yang diperoleh untuk prosedur penerbitan SPP dimana prosedur penerbitannya telah sesuai dengan teori pengendalian intern pemerintah yang berkaitan dengan :

- a. Ukuran dan sifat kegiatan instansi  
Dalam proses penyeteroran bendahara penerimaan menyetorkan semua hasil retribusi pasar harian di BUD/Bank disertai dengan STS (Surat Tanda Setor).
- b. Kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab instansi pemerintah  
Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses penyeteroran semua pihak telah menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari mandor menyetorkan hasil pemungutan retribusi, bendahara menyetorkan hasil pendapatan retribusi ke Bank dan kemudian Bank mengirimkan Bukti setoran dan STS ke DPPKAD sebagai PPKD.
- c. Menjelaskan Kejelasan Hubungan Dan Jenjang Pelaporan Intern Dalam Instansi Pemerintah  
Dalam penyeteroran hanya bendahara penerimaan yang dapat menerima hasil pemungutan retribusi pasar harian dan menyetorkan ke Bank.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dibandingkan dengan teori pengendalian intern pada pemerintah dapat dikatakan bahwa sistem tersebut sudah memadai karena terdapat beberapa unsur yang ada dalam teori pengendalian intern yang sesuai dengan hasil penelitian.

### **5. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat**

Kepala Dinas selaku pemimpin mempertimbangkan dengan baik pemberian jabatan untuk bendahara penerimaan, begitu juga dengan pemberian wewenang untuk para mandor akan dilihat dari kemampuan dan integritas orang tersebut. Dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi pasar harian telah memadai karena unsur-unsur yang ada dalam teori juga terdapat dalam hasil penelitian.

### **6. Penyusunan Penerapan Kebijakan SDM**

Dari hasil penelitian yang dibandingkan dengan teori pengendalian intern pemerintah tentang sumberdaya manusia terutama untuk pegawai. Pihak-pihak yang berwenang untuk penyeteroran diajukan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan kemampuan. Begitu juga dengan penunjukan BUD oleh PPKD. Dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dapat dikatakan bahwa sistem penyetoran retribusi pasar telah memadai karena unsur-unsur yang ada dalam teori juga terdapat dalam hasil penelitian.

### **7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal**

Dalam hasil penelitian untuk pengawasan pemungutan yang dilakukan oleh mandor diawasi oleh pegawai yang membawahi bagian pasar dan jika menemui temuan atau keluhan dari para pedagang tentang cara pemungutan atau apapun yang tidak sesuai dengan peraturan akan dikenai sanksi bahkan diganti. Dengan adanya pengawasan yang baik saat pemungutan maka para mandor juga tidak menemui kendala saat penyetoran hasil pemungutan retribusi. Penyetoran dilakukan tepat waktu sesuai kebijakan yang telah dibeikan oleh DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu yaitu bias setiap minggu karena pertimbangan waktu. Dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori dapat dikatakan bahwa sistem untuk penyetoran retribusi telah memadai karena unsur-unsur yang ada dalam teori terdapat dalam hasil penelitian.

### **8. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait**

Dari hasil penelitian tidak terdapat hambatan dalam proses penyetoran dengan BUD/Bank. Bank selalu memberikan pelayanan yang baik saat penyetoran dan mengirimkan bukti setoran ke PPKD tepat waktu.

### **B. Penilaian Resiko**

Dalam proses penyetoran seringkali terdapat kesalahan dalam pencatatan baik yang dilakukan oleh bendahara penerimaan maupun oleh pihak PPKD. Untuk itu Bank sebagai BUD selalu mengirimkan bukti setoran dan STS kepada PPKD dan SKPD tersebut. Dapat dikatakan bahwa prosedur penyetoran retribusi telah memadai karena yang ada dalam teori pengendalian intern pada pemerintahan juga terdapat pada hasil penelitian yang diperoleh.

### **C. Kegiatan Pengendalian**

Dalam hasil penelitian yang diperoleh untuk prosedur pengajuan SPP dimana prosedur penerbitannya telah sesuai dengan teori pengendalian intern pemerintah yang berkaitan dengan :

#### **1. Review Atas Kinerja Instansi Pemerintah**

Setiap hasil yang disetorkan oleh mandor kepada bendahara penerimaan akan dilaporkan ke Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Jad para pejabat dapat mereview kinerja dari mandor apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **2. Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu setiap pagi melakukan apel pagi dan doa bersama sebelum melakukan kegiatan. Dan setiap sebulan sekali para pegawai diminta untuk mengikuti pengajian bersama bagi yang beragama muslim. Tetapi yang beragama Kristen belum adanya jadwal untuk beribadahbersama.

#### **3. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi**

Analisis untuk proses penyetoran retribusi pasar yang dilakukan oleh mandor tidak setiap hari dilakukan Karen mempertimbangkan. Sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh DISPERINDAGKO & PM Kota Kotamobagu mandor dapat menyetorkan setiap minggu. Tetapi ada juga mandor yang terlambat menyetor tapi masih dapat diberikan toleransi dengan pertimbangan yang ada.

#### **4. Pengendalian Fisik Atas Aset**

Dari hasil penelitian untuk setiap akun memiliki kodenya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada. Kode akun tersebut berfungsi agar dapat membedakan akun-akun yang ada pada rekening. Untuk yang berkaitan dengan aset tetap misalnya kendaraan dinas pada DISPERINDAGKOP & PM Kota Kotamobagu ada untuk Kepala Dinas dan ada kendaraan operasional yang bisa digunakan karyawan.

#### **5. Pemisahan Fungsi**

Untuk Proses Penyetoran pihak yang terkait adalah mandor yang menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar harian, bendahara penerimaan yang menerima dan menyetorkan ke BUD/Bank, dan Bank yang berfungsi sebagai BUD yang menerima setoran.

## 6. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting

Dari hasil penelitian saat mandor menyetor ke bendahara penerimaan, bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi dalam STS. Saat menyetor ke Bank bendahara penerimaan melampirkan STS kemudian Bank mengembalikan STS dan bukti setoran yang sudah di otorisasi sebagai bukti. Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dibandingkan dengan teori pengendalian intern dapat dikatakan bahwa sistem dalam sistem penyetoran retribusi telah memadai karena unsur-unsur yang ada pada hasil penelitian juga terdapat pada teori pengendalian internal.

### D. Informasi dan Komunikasi

Dari hasil penelitian komunikasi antara mandor, bendahara penerimaan dan Bank selaku BUD telah berjalan dengan baik sehingga proses penyetoran dapat dilakukan dengan baik.

### E. Pemantauan

Berdasarkan penelitian sistem penyetoran yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal telah digambarkan mulai dari mandor menyetor ke bendahara penerimaan sampai pengiriman buti setor dan STS dari Bank ke DPPKAD dan SKPD yang terkait.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem dalam pemungutan retribusi telah memadai karena unsur-unsur yang ada pada hasil penelitian juga terdapat pada teori pengendalian internal.

### Saran

Saran yang dapat diberikan, sebagai berikut :

1. Dalam prosedur untuk pemungutan dan penyetoran tetap mempertahankan prosedur sesuai dengan sistem pengendalian internal yang terdapat di dalamnya dan untuk prosedur yang masih belum memadai untuk diperbaiki sesuai dengan sistem pengendalian internal pada pemerintahan.
2. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu agar dapat membuat jadwal Ibadah bersama bagi pegawai yang beragama Kristen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erdaini, Yunias, 2015. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar Kabupaten Jember. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73342/Yunias%20Noor%20E.-1-57.pdf?sequence=1>. Diakses 15 April 2016. Hal.1.
- Halim, Abdul dan Muhamad Syam Kusuf. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 59 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Permana, Ardana. 2013. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Semarang*. <http://eprints.undip.ac.id/42026/1/PERMANA.pdf>. Diakses 15 April 2016. Hal.1.
- Pramono, Hariadi., Yanuar Restianto dan Icut Bawono. 2010. *Pengelolaan keuangan daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.

